



Nawala INOVASI

Pendidikan Berkualitas untuk Semua

Juni 2025

03

Sekapur Sirih

04

Potret Keadaan Pendidikan Inklusif: Ibarat Pintu Kelas yang Setengah Terbuka

06

Simpul Permasalahan Empat Tantangan Sistemik yang Menggantal Pendidikan Inklusif

08

Pendekatan dan Pembelajaran Merajut Inklusi dengan Data dan Kolaborasi

10

Cerita dari Lapangan Kiprah Kepala SDN Rajaka Mewujudkan Pendidikan Inklusif

12

Praktik Baik Merawat Ruang Belajar yang Aman dan Berpusat pada Siswa

14

Praktik Baik Nur, Ai, dan Senyum Murid Disabilitas

Seluruh foto-foto di edisi ini diambil oleh staf INOVASI, kecuali kontribusi para mitra kerja yang tercantum di masing-masing foto. Anda dapat membuat salinan, mendistribusikan dan meneruskan materi ini secara bebas untuk tujuan non-komersial. Untuk meminta salinan atau untuk pembelajaran dan implementasi informasi lebih lanjut, silakan hubungi tim Komunikasi INOVASI melalui : info@inovasi.or.id atau kunjungi: inovasi.or.id



Sri Widuri
 Direktur Program INOVASI

Salam hangat,

Pendidikan adalah hak setiap anak, tanpa kecuali. Namun, bagi banyak anak dengan disabilitas di Indonesia, akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan inklusif masih menjadi perjuangan panjang. Tantangan demi tantangan mereka hadapi, mulai dari jalan menuju sekolah yang tidak ramah disabilitas, minimnya guru pembimbing khusus, keterbatasan alat bantu, hingga stigma sosial yang membatasi ruang mereka untuk belajar dan tumbuh.

Melalui edisi buletin kali ini, kami ingin menyoroti pentingnya membangun sistem pendidikan yang benar-benar berpihak pada anak dengan disabilitas. Seperti yang diangkat dalam kisah Mel dan Jes dari Sumba Barat, bahkan sekadar hadir di ruang kelas pun membutuhkan keberanian luar biasa. Mereka dan banyak anak lainnya membutuhkan dukungan menyeluruh—dari rumah, sekolah, hingga kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan riil mereka.

INOVASI percaya bahwa pendidikan berkualitas untuk semua hanya bisa tercapai jika kita memastikan bahwa tak satu pun anak tertinggal, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Pendidikan inklusif bukan sekadar pendekatan, ini adalah prasyarat menuju sistem yang adil, setara, dan relevan bagi semua anak Indonesia.

Diperlukan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, sekolah, komunitas, dan keluarga untuk mewujudkannya. Kita perlu memperkuat peran guru, memanfaatkan instrumen seperti Profil Belajar Siswa (PBS),

memperluas pelatihan pendidikan inklusif, serta memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar terimplementasi di lapangan.

Bersama para mitra, kami terus berkomitmen mendorong sistem pendidikan yang lebih adil dan berpihak. Kami percaya bahwa setiap anak, dengan segala keberagamannya, punya potensi besar untuk berkembang—asal sistemnya inklusif dan peluangnya terbuka.

Salah satu mitra INOVASI yang patut diapresiasi adalah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang telah menjadi pionir di Indonesia dalam memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pendidikan inklusif. Melalui peluncuran program Jejaring Konseling Online (JEJO), Bulungan menghadirkan inovasi konseling berbasis AI yang dirancang untuk menjangkau seluruh siswa, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil. Selain itu, program ini juga memberikan rekomendasi alat bantu belajar yang penting bagi siswa penyandang disabilitas. Langkah ini merupakan bagian dari visi strategis pemerintah daerah untuk menciptakan sumber daya manusia unggul melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Semoga edisi ini menginspirasi dan memperluas percakapan tentang inklusi, bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai keharusan—agar visi pendidikan berkualitas untuk semua benar-benar menjadi kenyataan.

Pendidikan Inklusif: Ibarat Pintu Kelas yang Setengah Terbuka



Guru berupaya membimbing siswa-siswa yang beragam, memastikan setiap anak mendapatkan perhatian dan dukungan yang dibutuhkan. Foto © Feri Latief/INOVASI 2025

“Bagi anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia, perjalanan menuju pendidikan yang layak bukan sekadar soal bisa masuk sekolah. Tantangan dimulai jauh sebelum gerbang sekolah terbuka: dari rumah, jalanan yang sulit diakses, lingkungan yang belum menerima, hingga sistem pendidikan yang belum sepenuhnya siap.”

Menurut Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, disabilitas bukan semata kondisi fisik atau sensoris, tetapi juga hambatan yang diciptakan oleh lingkungan dan masyarakat. Ketika siswa dengan disabilitas tidak bisa berpartisipasi secara penuh dalam pendidikan, penyebabnya sering kali adalah sistem yang tidak inklusif.

Mel dan Jes, dua kakak beradik dari Desa Rajaka di Sumba Barat, adalah contoh nyata dari situasi ini. Mereka memiliki kebutuhan belajar khusus dan telah terdaftar di sekolah dasar inklusi. Tapi untuk sampai ke sekolah saja, mereka harus menempuh jalan setapak yang licin dan berlumpur. Dulu, mereka bahkan sempat dilarang bersekolah. Di komunitas tempat mereka tinggal, anak disabilitas masih sering dianggap tidak perlu tampil di ruang publik. Tempat mereka dianggap “di rumah saja.”

Efek Bola Salju Eksklusi

Kesenjangan di setiap tahap pendidikan berdampak langsung pada masa depan anak disabilitas. Anak-anak yang tak mendapat layanan pendidikan inklusif sejak dini berisiko besar tersingkir dari sistem. Mereka kesulitan melanjutkan sekolah, tak memiliki akses ke pelatihan keterampilan, dan pada akhirnya terhambat masuk ke dunia kerja.

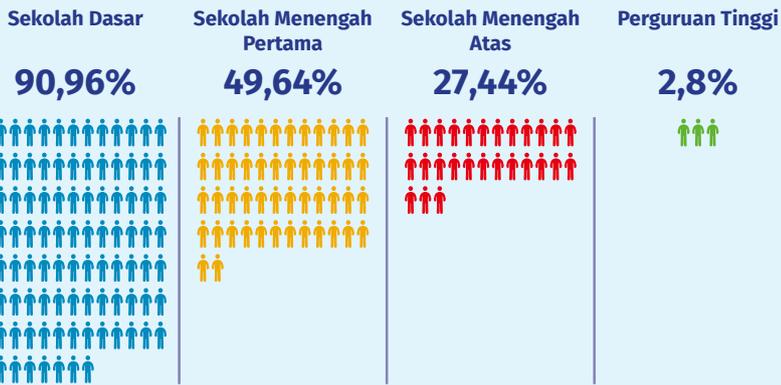
Inilah yang disebut sebagai efek bola salju eksklusi, di mana hambatan kecil yang tidak ditangani sejak awal akan membesar seiring waktu. Ketika seorang anak kehilangan akses PAUD karena sekolah menolak, ia tertinggal di SD. Ketika tidak ada Guru Pendidikan Khusus atau alat bantu di SD, ia tak mampu mengikuti pelajaran. Saat lulus pun, akses ke SMP terbatas, hingga ia tumbuh dewasa tanpa pendidikan atau keterampilan kerja yang memadai.

Potret Penyandang Disabilitas Indonesia (2024) menyebutkan bahwa hanya sekitar 21,65% penyandang disabilitas berat yang bekerja, dan sebagian besar berada di sektor informal dengan pendapatan rendah. Perempuan disabilitas menghadapi tantangan berlapis karena diskriminasi ganda berbasis gender dan disabilitas.

Akibat dari ketimpangan ini tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga membebani negara. Tahun 2024, Kementerian Sosial mengalokasikan Rp75 triliun untuk perlindungan sosial, termasuk bagi penyandang disabilitas. Tanpa sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, ketergantungan terhadap bantuan sosial akan terus berlangsung.



Angka partisipasi disabilitas di setiap tahapan hidup



- Di tingkat SD, partisipasi siswa penyandang disabilitas nyaris setara dengan siswa tanpa disabilitas.
- Partisipasi menyusut hingga hampir setengahnya di SMP dan menyusut kembali hampir setengahnya di SMA
- Hanya 3 dari 100 siswa penyandang disabilitas yang berhasil menembus perguruan tinggi
- Saat dewasa, **21,65% penyandang disabilitas terserap di dunia kerja, namun mayoritas beraktivitas di sektor informal dengan upah rendah.**

Akar Masalah yang Saling Berkaitan

Salah satu faktor kunci keberhasilan pendidikan inklusif adalah keberadaan Guru Pendidikan Khusus (GPK). GPK memiliki keahlian untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional siswa, merancang pendekatan belajar yang sesuai, memfasilitasi komunikasi antara murid dan orang tua, serta mendampingi guru-guru di kelas dalam mewujudkan pembelajaran yang inklusif.

Namun, data menunjukkan bahwa hanya 14,83% dari 40.164 sekolah yang menerima siswa dengan disabilitas atau sekitar 5.956 sekolah saja yang memiliki GPK untuk mendampingi guru-guru di kelas dalam mewujudkan pembelajaran yang inklusif di Indonesia (Kompas, 2024). Bahkan, satu GPK bisa menangani hingga 28 siswa, rasio yang jauh dari ideal, terutama mengingat kebutuhan tiap siswa yang berbeda.

Sementara itu, guru reguler yang menjadi garda depan di sekolah masih sangat terbatas aksesnya terhadap penyelenggaraan dan pelatihan pendidikan inklusif. Menurut World Bank (2024), hanya sekitar 12,6% guru yang pernah mendapat pelatihan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk siswa disabilitas, dan sebagian besar masih merasa tidak percaya diri mengajar, bahkan setelah mendapatkan pelatihan.

Fasilitas penunjang juga belum merata. Teknologi asistif seperti pembaca layar, buku braille, dan materi visual atau audio masih langka. Di banyak sekolah, pengadaan alat bantu bergantung pada inisiatif pribadi guru atau anggaran terbatas sekolah.

Masalah tidak berhenti di sekolah. Hambatan fisik dan sosial memperburuk situasi. Jalan yang tidak ramah disabilitas, transportasi terbatas, serta stigma yang masih kuat membuat banyak keluarga ragu menyekolahkan anaknya. Anak disabilitas dianggap “tidak mampu belajar”. Padahal, cara pandang inilah yang justru meminggirkan mereka sejak awal. Tak sedikit orang tua, terutama ibu, yang harus berhenti bekerja untuk mendampingi anak belajar, hingga menambah beban ekonomi rumah tangga.

Selain itu, kurangnya data yang terpilah berdasarkan jenis disabilitas dan kebutuhan Fungsional juga memperumit masalah. Tanpa data yang akurat, perencanaan dan penganggaran menjadi tidak tepat sasaran. Pemerintah daerah dan sekolah tidak memiliki dasar kuat untuk menentukan jumlah guru yang dibutuhkan, jenis alat bantu yang diperlukan, atau bentuk pelatihan yang relevan.

Koordinasi antar sektor –pendidikan, sosial, kesehatan, perhubungan—pun masih sangat perlu ditingkatkan. Padahal, pendidikan inklusif hanya bisa terwujud jika semua pihak bergerak bersama. Banyak sekolah atau satuan pendidikan yang menerima siswa dengan disabilitas berjuang sendirian di tengah sistem yang belum utuh.

Tugas Membumikan Kebijakan ke Aksi Nyata

Indonesia sejatinya telah memiliki dasar kebijakan yang progresif yang mendukung inklusi pendidikan, dari ratifikasi Konvensi PBB, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, hingga Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 yang menekankan akomodasi layak. Pemerintah juga mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di daerah sebagai pusat pendataan dan koordinasi dukungan bagi siswa dengan disabilitas. ULD diharapkan menjadi penghubung bagi berbagai sumber daya, termasuk pelatihan bagi guru, serta tempat bernaung bagi GPK yang melayani sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang menerima siswa dengan disabilitas. Namun, semua ini belum cukup jika hanya berhenti di atas kertas.

Siswa dengan disabilitas seperti Mel dan Jes membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Mereka butuh sistem yang hadir sejak awal, dari rumah, ke ruang kelas, hingga ke dunia kerja. Pendidikan inklusif bukan hanya soal akses masuk sekolah, tetapi tentang bagaimana setiap siswa dengan disabilitas bisa tumbuh, belajar, dan hidup mandiri dengan hak yang setara.

Tanpa guru yang tepat, sistem yang kuat, dan perubahan cara pandang, pendidikan akan terus menjadi pintu yang tampak terbuka, tapi tetap menyisakan banyak siswa dengan disabilitas berdiri di ambangnya.

Simpul Permasalahan

Empat Tantangan Sistemik yang Mengganjal Pendidikan Inklusif



Guru dan pendamping hadir untuk mendukung siswa dengan disabilitas, memastikan setiap pelajaran dapat diikuti dengan maksimal. Foto: © INOVASI

Mewujudkan pendidikan inklusif bagi siswa dengan disabilitas memerlukan lebih dari sekadar komitmen normatif. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak hambatan yang saling berkaitan. Empat tantangan utama yang menjadi akar persoalan adalah keterbatasan guru dan sarana pembelajaran, infrastruktur yang belum aksesibel, stigma sosial dan minimnya informasi, serta lemahnya data dan koordinasi lintas sektor.

1. Keterbatasan Guru dan Sarana Pembelajaran

Guru Pendidikan Khusus (GPK) di sekolah atau satuan pendidikan yang menerima siswa dengan disabilitas masih sangat terbatas. Bayangkan, satu guru harus menangani hingga 28 peserta didik—jauh dari maksimal rasio pada sekolah luar biasa, 1:5 yang ditetapkan Kemendikdasmen. Kualitas guru juga menjadi sorotan; banyak yang belum mendapatkan pelatihan formal tentang pendidikan inklusif, termasuk penggunaan bahasa isyarat atau pengembangan materi bagi siswa tunanetra. Kementerian Agama telah melatih 17.381 guru madrasah pada 2024, tetapi skala kebutuhan jauh lebih besar mengingat lebih dari 83.000 madrasah tersebar di Indonesia.

Masalah lain yang mengemuka adalah jenjang karier sebagai GPK yang masih belum jelas dan belum adanya skema insentif yang terstandardisasi bagi GPK. Beberapa daerah telah memberikan insentif tambahan, namun hal ini masih sangat bergantung pada inisiatif pemerintah daerah dan belum menjadi kebijakan yang merata.

Di sisi lain, ketersediaan GPK juga bergantung pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Saat ini, pendidikan inklusi baru menjadi mata kuliah yang disisipkan dalam berbagai program studi kependidikan. Untuk jangka panjang, perlu didorong agar LPTK membuka lebih banyak program studi (prodi) pendidikan khusus. Saat ini, hanya terdapat tujuh perguruan tinggi negeri yang memiliki prodi tersebut, dan mayoritas

masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga menyebabkan ketimpangan pasokan guru pendamping di wilayah lain.

Keterbatasan juga terjadi dalam penyediaan teknologi asistif (TA). Survei Bank Dunia (2023) menunjukkan hampir 70% GPK tidak memiliki TA di sekolahnya, meskipun terdapat siswa dengan disabilitas yang memerlukannya. Penyediaan alat bantu ini masih bergantung pada inisiatif sekolah dan guru, bukan pada dukungan sistemik dari pemerintah.

2. Infrastruktur dan Aksesibilitas yang Belum Mendukung

Hambatan fisik menjadi tantangan utama sejak dari rumah. Akses jalan yang tidak ramah disabilitas, ketiadaan transportasi inklusif, serta kurangnya pendamping membuat kehadiran siswa tidak menentu. Di sekolah, banyak bangunan belum dilengkapi jalur landai, toilet aksesibel, atau ruang kelas yang ramah kursi roda.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 mewajibkan akomodasi yang layak bagi siswa dengan disabilitas. Namun pelaksanaannya belum merata. Survei Knowledge Sector Initiative (2020) di Jawa Timur menunjukkan bahwa meski sebagian guru telah menerapkan penyesuaian seperti subtitle video, voice note, atau tugas berbasis foto, masih banyak yang memberi perlakuan seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan individual siswa.

3. Stigma Sosial dan Minimnya Informasi

Stigma terhadap siswa dengan disabilitas masih kuat di tingkat keluarga dan masyarakat. Banyak orang tua masih enggan menyekolahkan anak mereka karena dianggap “lebih baik di rumah.” Informasi tentang hak atas pendidikan dan ketersediaan layanan juga belum menjangkau banyak komunitas.

Di sisi lain, guru dan sekolah kadang masih menggunakan pendekatan pembelajaran yang tidak inklusif. Padahal, Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (Ruang GTK) mendukung pengajaran berdiferensiasi melalui Kurikulum Merdeka. Pendekatan ini mendorong penyesuaian metode,

konten, dan penilaian berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Namun hal ini hanya berjalan optimal bila guru memiliki pemahaman dan dukungan teknis yang memadai.

4. Lemahnya Data dan Koordinasi Antarlembaga

Salah satu fondasi penting pendidikan inklusif adalah data yang akurat. Instrumen Profil Belajar Siswa (PBS) dikembangkan oleh Kemdikdasmen dan Kementerian Agama, membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik siswa dengan disabilitas, seperti kesulitan fungsional, alat bantu, dan kondisi medis. Namun, pemanfaatannya belum menyeluruh. Di beberapa kabupaten, PBS telah digunakan untuk menyusun anggaran dan layanan yang lebih responsif. Tapi di banyak daerah lain, belum ada sistem atau insentif yang mendorong pemanfaatan PBS secara rutin.

Di tingkat kelembagaan, koordinasi lintas sektor masih terfragmentasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama menangani kurikulum dan sekolah. Kementerian Sosial menyangkut perlindungan sosial, Kementerian Kesehatan terkait asesmen dan layanan medis, Kementerian Perhubungan dan Bappeda daerah mengatur transportasi dan anggaran. Namun, belum ada mekanisme efektif yang menyatukan langkah-langkah tersebut.

Sebagai upaya membangun simpul koordinasi, Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). ULD memiliki mandat menyusun kebijakan, melatih guru, mengelola data, dan memantau layanan pendidikan khusus. Sayangnya, hingga Desember 2024, baru 30 kabupaten/kota dan 4 provinsi yang memiliki Surat Keputusan ULD. Di sektor madrasah, ULD baru hadir di satu wilayah saja, dari lebih dari 83.000 madrasah yang ada.

Tantangan lainnya adalah minimnya anggaran dalam pengadaan TA maupun pembiayaan ULD yang terstandar. Ketiadaan dukungan ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan.

Menuju Sistem yang Berpihak pada Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif tidak bisa dibebankan hanya pada sektor pendidikan. Siswa dengan disabilitas menghadapi hambatan yang bersifat multidimensi—mulai dari kesehatan, mobilitas, perlindungan sosial, hingga penerimaan di lingkungan. Maka, solusi pun harus lintas sektor, lintas jenjang pemerintahan, dan melibatkan komunitas secara aktif.

Transformasi menuju sistem yang inklusif sedang berlangsung salah satunya melalui pemanfaatan instrumen seperti Profil Belajar Siswa (PBS). Data yang dikumpulkan dari PBS dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya manusia serta pendanaan guna mendukung siswa dengan disabilitas dan sekolah atau satuan pendidikan yang menerima siswa dengan disabilitas. Pemerintah Indonesia juga bermitra dengan INOVASI untuk mengembangkan perangkat dan sistem yang mendukung penerapan pendidikan inklusif di sekolah.

Perubahan struktural hanya akan berhasil jika diiringi dengan penguatan regulasi, pendanaan yang terencana, peningkatan kapasitas guru, serta mekanisme koordinasi antarlembaga yang kuat dan terintegrasi. Pendidikan inklusif tidak cukup hanya membuka pintu kelas, tetapi harus memastikan bahwa seluruh sistem—dari ruang kebijakan, ke rumah, ke ruang kelas, hingga ke komunitas—benar-benar berpihak pada siswa dengan disabilitas.

Pendekatan dan Pembelajaran Merajut Inklusi dengan Data dan Kolaborasi

Catur, seorang siswa di sekolah dasar negeri, mencerminkan wajah pendidikan inklusif yang tengah diperjuangkan di Indonesia: berbasis data dan berpusat pada kebutuhan siswa. Ia mengalami hambatan pendengaran dan bicara, dan mengikuti pelajaran dengan membaca gerakan bibir serta mendengar suara keras dari guru. Semangat belajarnya tinggi, namun keterbatasan alat bantu dengar dan layanan medis menghambatnya berkembang optimal.



Seorang siswa tunarungu menjelaskan jawabannya dengan percaya diri. Inklusi memberinya ruang untuk bersuara. Foto: © Feri Latief/INOVASI 2025

Kebutuhan Catur teridentifikasi melalui Profil Belajar Siswa (PBS), PBS menjangkau data siswa dan berfokus pada fungsi, sementara screening diagnosis medis dibutuhkan untuk menentukan disabilitas atau tidaknya siswa. Melalui asesmen di kelas, guru memetakan hambatan fungsional seperti kesulitan mendengar, berbicara, bergerak, atau berinteraksi. Ini membantu guru menyusun strategi pengajaran yang lebih kontekstual, dan memberi dasar perencanaan yang lebih tepat bagi pemerintah daerah.

Dari Data untuk Model Pendekatan yang Terpadu

Sejak dikenalkan tahun 2019, PBS telah diuji coba di berbagai jenjang, mulai dari SD/MI hingga SMA/MA, dan menjangkau 19.614 siswa. Data pemantauan pengisian PBS di sekolah juga telah tersedia dan diperbarui secara langsung oleh Kemdikdasmen dan Kemenag. Dengan informasi yang terbuka, mudah diakses, dan termutakhir, guru semakin memahami kondisi siswa secara menyeluruh, dan sekolah mulai mengambil keputusan berdasarkan data. Pendekatan ini berpotensi mendorong perubahan sistemik –dari kebijakan hingga pelatihan guru dan layanan lintas sektor.

Berangkat dari keberhasilan tersebut, pemerintah bersama INOVASI merintis sistem dukungan layanan bagi siswa dengan disabilitas bersama Dinas Pendidikan, kantor Kementerian Agama, serta lintas Organisasi Perangkat Daerah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS), dan corporate social responsibility (CSR) berbasis data yang telah dilaporkan guru, baik di sekolah maupun madrasah. Sistem ini juga telah diujicobakan di empat kabupaten: Bogor, Cirebon, Lombok Timur, dan Bulungan, untuk memperkuat pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan di sekolah, dinas, hingga kementerian.

Di Kabupaten Bogor, PBS menjadi dasar perencanaan layanan madrasah melalui kerja sama Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Model ini juga mendorong integrasi PBS ke sistem data nasional seperti Dapodik dan EMIS, membangun sistem informasi yang menyatu.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, dikembangkan pula platform digital “Rumah Pendidikan”, yang memungkinkan data digunakan bersama oleh guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, kementerian, hingga orang tua dan siswa. Ini adalah terobosan penting yang tidak hanya menyatukan informasi, tapi juga membagi tanggung jawab dan mempercepat aksi. Salah satu manfaat praktisnya adalah kemudahan akses.

Aktor pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan tidak lagi harus membuka berbagai aplikasi berbeda. Dengan begitu, beban administratif berkurang, dan perhatian bisa difokuskan kembali ke hal yang paling utama, yakni proses belajar mengajar.

Bertumpu pada Inovasi, Bergerak karena Kolaborasi

Pengalaman pelaksanaan PBS menunjukkan bahwa data adalah langkah awal yang krusial, tetapi yang membuatnya bermakna adalah bagaimana data itu dimanfaatkan. Berbagai bentuk dukungan kini hadir berkat analisis yang bersumber dari data PBS.

Siswa mendapatkan alat bantu belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan fungsional mereka. Guru juga memperoleh dukungan melalui layanan konseling yang menggabungkan chatbot AI dan tenaga ahli, yang dirancang agar mudah diakses melalui WhatsApp. Layanan ini memungkinkan guru berkonsultasi secara langsung saat menghadapi tantangan di kelas inklusi. Data PBS juga dimanfaatkan untuk menugaskan Guru Pendidikan Khusus (GPK) berdasarkan profil dan kebutuhan peserta didik disabilitas di sekolah atau satuan pendidikan yang menerima siswa dengan disabilitas tempat mereka bertugas. Selain itu, sekolah mendapat dukungan untuk peningkatan sarana dan prasarana agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa.

Untuk memperkuat ekosistem layanan yang mendukung pemanfaatan data secara menyeluruh, fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) terus diperkuat. ULD berperan sebagai penghubung antara kebutuhan siswa dan layanan yang tersedia di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial—termasuk dukungan sektor swasta melalui program *corporate social responsibility* (CSR). Dengan peran yang lebih strategis, ULD memastikan bahwa data dari sekolah tidak berhenti di angka, melainkan menjadi dasar rujukan dan dukungan yang konkret. Salah satu praktik baik yang dilakukan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara adalah terlaksananya fungsi penyediaan alat bantu dan fungsi pendampingan guru di sekolah melalui konseling secara daring (program JEJO). Di kabupaten lain, seperti

Lombok Timur dan Bogor, optimalisasi fungsi ini sedang dikembangkan—dengan mendorong kantor Kementerian Agama di tingkat daerah.

Data PBS juga memacu lahirnya inovasi teknologi bantu yang mendukung pembelajaran. Salah satunya adalah Bookbot Indonesia, sebuah aplikasi membaca interaktif yang dikembangkan khusus untuk siswa dengan disleksia. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembelajaran adaptif tengah dirintis untuk menghadirkan solusi pembelajaran yang semakin personal dan sesuai kebutuhan serta kemampuan tiap siswa.

Semua langkah ini dapat terlaksana karena kemitraan yang mulai terbangun di ekosistem pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, masyarakat sipil, pihak swasta, dan mitra pembangunan, saling mendukung dan saling melengkapi inisiatif yang ada.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, misalnya, revisi Peraturan Gubernur yang berbasis data PBS menjadi contoh bagaimana data dapat memicu reformasi kebijakan di tingkat provinsi. Sementara itu, di Kabupaten Lombok Tengah dan Bogor, kolaborasi lintas sektor melahirkan program seperti “Semua Anak Cerdas”, yang kini bahkan didanai secara mandiri oleh pemerintah daerah melalui dana BOS.

Perubahan mendasar berbasis data saja telah membukakan jalan bagi satu siswa dengan disabilitas untuk belajar dengan lebih baik. Inilah inti dari pendidikan inklusif: tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi meresponsnya dengan sistem yang adil, inovatif, dan kolaboratif. Pendekatan seperti inilah yang menggerakkan kita, bukan sekadar untuk menjangkau lebih banyak anak, tapi untuk menjangkau mereka dengan cara yang tepat.

Dari Kabupaten Kalimantan Utara, Data Menggerakkan Aksi*

Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pemetaan Profil Belajar Siswa (PBS) baru mencakup sebagian sekolah: 736 SD/MI dan 285 SMP/MTS di 10 kecamatan. Dari 1.023 siswa yang dilaporkan oleh guru melalui PBS, sebanyak 316 (60,8% siswa laki-laki dan 39,2% siswa perempuan) teridentifikasi mengalami kesulitan fungsional, mulai dari hambatan pendengaran, penglihatan, hingga hambatan belajar lainnya—dengan jumlah terbanyak adalah siswa dengan kesulitan fungsi intelektual dan kesulitan membaca. Namun, sebanyak 35,3% siswa masih belum dilakukan penyesuaian dalam pembelajaran.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Bulungan memverifikasi kondisi di lapangan dan merinci kebutuhan siswa, seperti alat bantu dengar, kacamata, kursi roda, hingga papan komunikasi. Data ini dibawa ke forum lintas dinas dan ditindaklanjuti bersama. Salah satu dukungan datang dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), yang menyediakan tenaga konselor dan memperkuat layanan rujukan psikososial bagi siswa dan orang tua.

Dukungan juga diperkuat melalui penugasan Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah-sekolah dengan kasus berat, serta pengembangan layanan konseling guru yang mudah diakses melalui WhatsApp dengan kombinasi chatbot dan tenaga ahli.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa ketika data digunakan secara tepat dan dikolaborasikan lintas sektor, perubahan bisa langsung dirasakan di ruang kelas. Jika PBS dilakukan di seluruh sekolah di Bulungan, potensi dampaknya akan jauh lebih besar, menjangkau lebih banyak anak, dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam akses pendidikan.

*Data diakses pada 23 Juni 2025.

Cerita dari Lapangan

Kiprah Kepala SDN Rajaka Mewujudkan Pendidikan Inklusif Selvita Menyusuri Desa, Menyuarakan Hak Belajar Setara bagi Setiap Anak



Selvita adalah contoh nyata bahwa kepemimpinan yang kuat dan penuh empati adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang sejati. Foto © Feri Latief/INOVASI 2025

Pada suatu pagi, Selvita Triyonani, S.Pd.SD menyusuri jalan setapak yang berlumpur di Dusun Rajaka, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepala SDN Rajaka ini hendak mengunjungi rumah dua siswinya, Mel dan Jes, kakak-beradik yang tergolong lambat belajar—anak-anak dengan kemampuan belajar yang lebih lambat dari teman sebayanya. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi bagian dari upayanya untuk berdiskusi langsung dengan orang tua kedua anak, demi memastikan kebutuhan belajar mereka terpenuhi.

Selvita ingin memastikan anak-anak berkebutuhan khusus di Dusun Rajaka tetap bersekolah. “Awalnya banyak sekali pertentangan dari masyarakat. Mereka menganggap anak berkebutuhan khusus tidak perlu disekolahkan. Bahkan kalau bisa, disembunyikan karena dianggap membawa aib bagi keluarga,” ungkap Selvita.

Pandangan seperti inilah yang ingin ia ubah, bahwa semua anak berhak belajar, tumbuh, dan mandiri.

Mengikis Stigma

Pengalaman sebagai guru di SDN Tabulo Dara, yang banyak memiliki peserta didik dengan disabilitas, menjadi bekal penting bagi Selvita. Di sana, ia mendapat pelatihan dan pendampingan tentang pendidikan inklusi. Saat dipromosikan menjadi Kepala SDN Rajaka pada 2023, ia mendapati kenyataan bahwa banyak anak dengan disabilitas di daerah itu tidak diizinkan bersekolah karena adanya stigma.

Padahal, sejak 2022, SDN Rajaka sudah ditetapkan sebagai sekolah rintisan inklusi dan siap menerima peserta didik dengan disabilitas. Namun, orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas masih enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah atau satuan pendidikan yang menerima siswa dengan disabilitas.

Meyakinkan orang tua agar anaknya bisa bersekolah tidaklah mudah. Selvita pun mendatangi perangkat desa untuk membahas hal ini. Ia ingin ada dukungan dari tokoh-tokoh setempat agar anak-anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan izin dari orang tua mereka. Bersama perangkat desa, ia menginisiasi

pertemuan warga untuk menyampaikan pentingnya pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Usahanya membuahkan hasil. Perlahan, orang tua mulai mengizinkan anak-anak mereka kembali ke sekolah.

Selvita juga menguatkan kapasitas guru-guru di sekolahnya. Melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), ia mengajak para guru untuk belajar bersama tentang pendidikan inklusi. “Saya membagikan ilmu yang dulu saya dapatkan, karena menurut saya guru harus dibekali dengan pemahaman pendidikan inklusi. Kalau tidak, anak-anak sudah sekolah tapi tetap tidak mendapatkan haknya dengan baik,” jelasnya.

Upaya Bersama

Mewujudkan pendidikan inklusi adalah upaya bersama. Sejak 2018, SDN Rajaka telah didampingi oleh Yayasan Bahtera Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) – ActionAid. Yayasan ini fokus pada pendidikan inklusi dan memberikan berbagai pelatihan untuk guru-guru. Puncaknya, pada Mei 2022, SDN Rajaka resmi ditetapkan sebagai sekolah rintisan inklusi oleh Dinas Pendidikan Sumba Barat dan Bahtera YAPPIKA – ActionAid, dengan kehadiran Duta Bahtera, aktor Reza Rahadian.

Yakobus Praing, pendamping dari YAPPIKA – ActionAid, menyebutkan bahwa SDN Rajaka menjadi sekolah percontohan inklusi di Sumba Barat karena komitmen kepala sekolah dan para guru terhadap keberadaan peserta didik inklusi. Namun, tantangan tetap ada. Para guru masih menghadapi kesulitan karena kebutuhan anak-anak

sangat beragam—mulai dari hambatan belajar hingga hambatan pendengaran. Para guru bahkan harus menciptakan bahasa isyarat sendiri karena belum pernah mendapatkan pelatihan khusus.

PBS Membantu Mengidentifikasi Peserta Didik

Di tengah keterbatasan para pendidik di SDN Rajaka dimana tidak ada satupun guru yang merupakan lulusan pendidikan luar biasa, mereka mendapatkan angin segar dengan hadirnya Profil Belajar Siswa (PBS) yang dikembangkan oleh INOVASI. Begitu mendapatkan informasi terkait PBS, meskipun tidak dilatih secara langsung, Selvita langsung mempraktikkan pengisian PBS melalui aplikasi dan melatih guru-guru lainnya untuk memanfaatkan PBS. Bahkan di Bulan Maret 2025 lalu, Selvita diminta mempraktikkan cara pengisian PBS melalui KKG di wilayahnya.

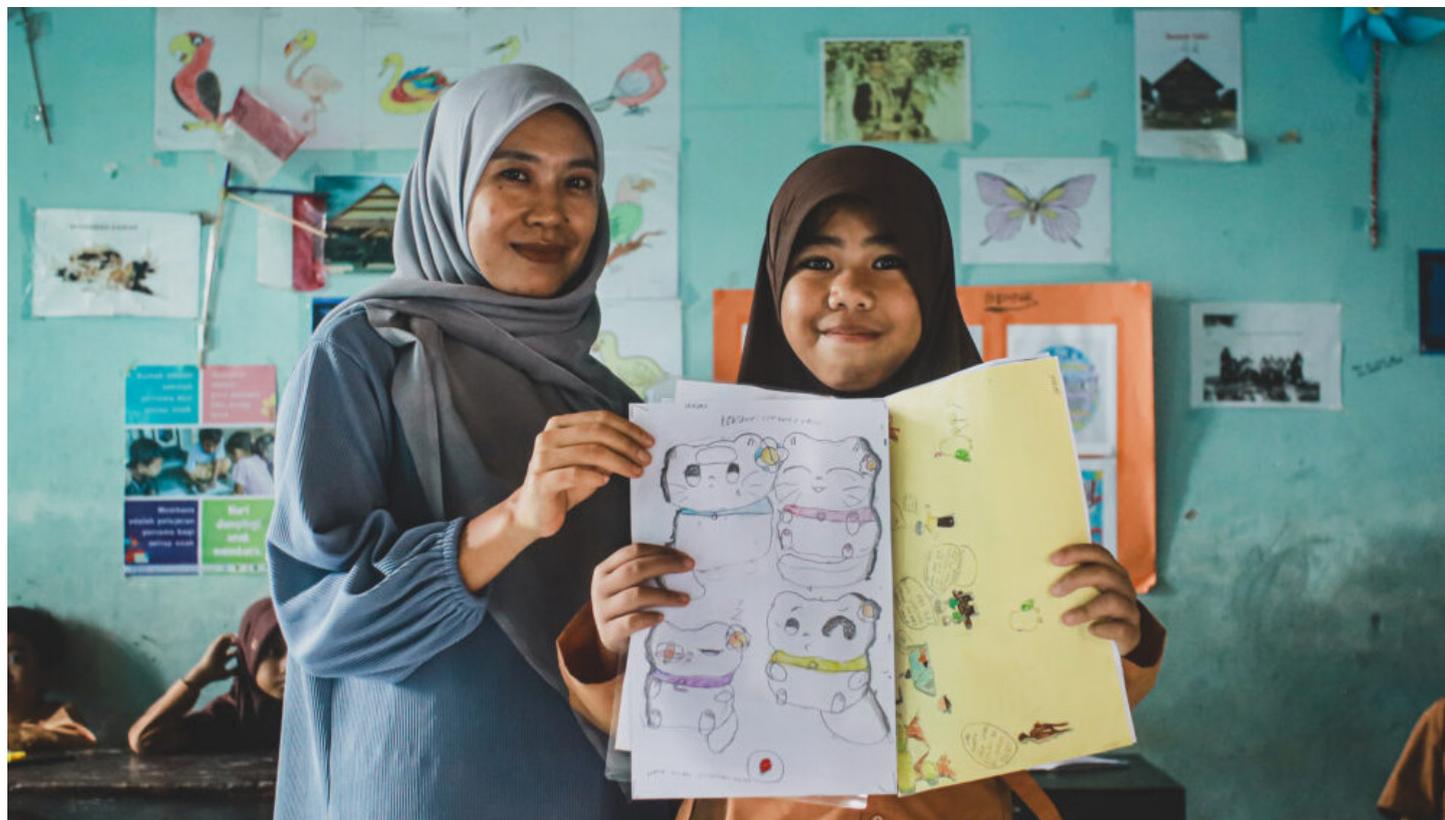
Bagi para pendidik di wilayah Rajaka, PBS sangat membantu guru mengidentifikasi kebutuhan dan kesulitan peserta didik, sehingga dapat disusun pembelajaran yang lebih akomodatif dan layanan yang lebih sesuai di tengah keterbatasan kemampuan para pendidik.

Bagi Selvita, mewujudkan pendidikan inklusi di Rajaka adalah misi yang belum tuntas hingga seluruh anak dengan disabilitas bisa bersekolah. Dengan semangat itu, ia masih setia menyusuri desa-desa dan membawa pemahaman baru agar tiap orang tua menyekolahkan anak mereka. “Kita harus lebih giat lagi berjuang agar anak dengan disabilitas mendapatkan haknya untuk bersekolah. Ini PR kita bersama,” tutupnya.



Saat istirahat, taman sekolah berubah jadi ruang baca. Selvita hadir di tengah anak-anak, memastikan tak ada yang merasa tertinggal. Foto: © Feri Latief/INOVASI 2025

Merawat Ruang Belajar yang Aman dan Berpusat pada Siswa



Putri dengan bangga memperlihatkan hasil dari tugas menggambar yang diberikan oleh Ibu Ratna Dewi (Ibu Ana). Berkat guru yang perhatian seperti Ibu Ana, Putri bisa belajar dengan baik. Ia juga menjadi percaya diri untuk memunculkan potensi lain dalam dirinya. Foto: © Junaedi Uko/INOVASI

Putri, pelajar kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Lombok Timur, menghadapi tantangan belajar akibat hambatan emosional dan kesulitan motorik. Namun, dengan dukungan yang tepat dari para guru dan sekolah, ia semakin nyaman dalam mengeksplorasi potensinya.

Sejak kelas 1, perilaku Putri berbeda dari teman-temannya. Ia mudah tersulut emosi, sering mengalami tantrum, dan kadang menolak mengikuti pelajaran. Ia juga kerap meninggalkan kelas tanpa izin, sesuatu yang dimaklumi oleh para gurunya. Saat duduk di kelas 2, kesulitan motoriknya mulai terungkap – ia mengalami kesulitan dalam memegang pensil dengan baik. Memasuki kelas 3, ia lebih suka menyendiri daripada berbaur dengan teman-temannya.

Namun, alih-alih menyerah, para guru terus menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi Putri.

Dukungan Guru dan Ruang Aman

Pendekatan yang diberikan kepada Putri berkembang dari tahun ke tahun. Saat di kelas 1, Ibu Ana memberikan fleksibilitas kepadanya untuk keluar kelas ketika merasa tidak nyaman. Sikap ini membantunya menyesuaikan diri tanpa merasa tertekan.

Ketika naik ke kelas 2, Ibu Miswayun Unun mengenalkan latihan sederhana untuk melatih motorik halus, seperti meremas kertas setiap hari. Latihan ini perlahan membuahkan hasil, hingga akhirnya Putri mampu memegang pensil dengan lebih baik.

Di kelas 3, Putri semakin menunjukkan kebutuhan belajar yang khas. Ia lebih nyaman belajar sendiri daripada duduk bersama teman-temannya. Ibu Ratna Dewi, gurunya, memahami kebutuhan ini dan memberinya keleluasaan untuk memilih tempat duduk sendiri.

“Putri meminta untuk duduk sendiri, dan saya izinkan agar ia bisa belajar dengan tenang,” ujar Ibu Ratna Dewi.



Ibu Ratna Dewi tengah menjelaskan materi pembelajaran kepada seorang siswa berkebutuhan khusus. Sebagai guru, Ibu Ratna menyadari pentingnya untuk lebih responsif terhadap kebutuhan semua siswa, khususnya mereka yang memiliki tantangan dalam pembelajaran. Foto: © Junaedi Uko/INOVASI

Pendekatan ini mencerminkan prinsip dasar pendidikan inklusif, yaitu menerima keberagaman kebutuhan siswa dan menyediakan dukungan yang sesuai agar setiap anak dapat belajar dengan nyaman.

Program MAULANA dan Pembelajaran yang Berpusat pada Siswa

Ibu Ana, Ibu Miswayun Unun, dan Ibu Ratna Dewi adalah guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (MI NWDI) 04 Pancor, Lombok Timur. Di sekolah ini, budaya berbagi pengetahuan di antara para guru telah tumbuh. Untuk mengeksplorasi pendekatan yang lebih responsif terhadap peserta didik, mereka kerap berdiskusi rutin mengenai metode mengajar dan cara memahami tanda-tanda kesulitan belajar.

Keberhasilan para guru di MI NWDI 04 dalam mendampingi siswa dengan disabilitas dipengaruhi oleh program MAULANA (Madrasah Unggul Anak Hebat) yang didukung oleh INOVASI. Program ini adalah kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Kanwil Kementerian Agama Lombok Timur, serta Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NWDI Pancor, sebagai lembaga yang mengelola program calon guru MI di Kabupaten Lombok Timur. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi secara inklusif.

MAULANA menekankan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi siswa. Dalam pelatihan ini, guru-guru belajar berbagai teknik, termasuk metode sederhana untuk melatih motorik halus serta pendekatan inklusif terhadap siswa dengan hambatan belajar.

“Program ini mengingatkan kami bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar, apa pun tantangannya,” ujar Ibu Ana.

Pemahaman ini memperkuat komitmen para guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua siswa.

Merangkul Keberagaman untuk Menumbuhkan Potensi Terbaik

Berkat pendampingan dari para guru, Putri lebih mampu mengelola emosinya. Jika sebelumnya ia sering menangis atau marah saat menghadapi kesulitan belajar, kini ia lebih tenang dalam menghadapinya.

“Sekarang, kalau merasa kesulitan belajar, Putri tidak lagi menangis, marah, atau keluar dari ruangan. Ia hanya merebahkan diri di mejanya. Jika sudah begitu, saya akan menghampirinya dan menunjukkan bahwa ia tidak sendirian, bahwa kami ada di sini,” tutur Ibu Ana.

Selain itu, potensi akademiknya mulai terlihat. Kemampuannya dalam menggambar berkembang pesat dan bahkan lebih menonjol dibandingkan teman-temannya. Pendampingan dan apresiasi dari guru membuatnya semakin percaya diri dalam mengembangkan keterampilan tersebut.

“Ini artinya, jika didampingi dengan baik, Putri cepat belajarnya,” tambah Ibu Ana.

Cerita Putri menunjukkan pentingnya proses pembelajaran yang disesuaikan dengan ragam kebutuhan setiap peserta didik. Di MI NWDI 04, guru-guru tidak hanya menekankan pada hasil akademik, tetapi juga membangun lingkungan yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak.

Hari Guru dan Hari Disabilitas mengingatkan kita bahwa membangun ruang belajar yang aman dan berpusat pada siswa adalah inti dari pendidikan inklusif. Hal ini perlu diwujudkan setiap hari agar setiap anak, dengan seluruh keberagamannya, dapat tumbuh dan mencapai potensi terbaiknya.

Nur, AI, dan Senyum Murid Disabilitas

Setiap kali menerima murid disabilitas, hati Nurhayati Luther gelisah. Ia ingin membantu, tetapi guru SDN 032 Tanjung Selor itu tidak tahu harus mulai dari mana. Anak-anak disabilitas itu duduk di kelas seperti murid lainnya, tetapi tidak benar-benar belajar. Nur, begitu ia biasa disapa, pada akhirnya hanya bisa menatap mereka, lalu berpaling. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena tidak mampu.

Kamis (8/5) itu, di Kantor Bupati Bulungan, Tanjung Selor, Nur berbicara soal luka, harapan, dan perjuangan guru sekolah umum mendidik murid disabilitas. Perjuangannya berliku. Tanpa panduan, pelatihan, pendampingan, dan harapan yang jelas. Dengan suara yang sesekali bergetar, Nur mengisahkan pergulatan batinnya dalam gelar wicara “Mewujudkan Pendidikan Dasar yang Bermutu bagi Semua Anak yang Setara, Inklusif, dan Berkeadilan”. Acara ini diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan didukung oleh INOVASI, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Utara, Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK) Kalimantan Utara, dan Kementerian Agama.

Sudah bertahun-tahun ia mencari jawaban. Ia bertanya kepada kepala sekolah, berdiskusi dengan pengawas, tetapi jawabannya selalu sama: lanjutkan saja mengajar. Tidak pernah ada solusi konkret. Ketika benar-benar buntu, Nur memilih diam. Ia kembali pada rutinitas, membiarkan murid disabilitasnya duduk tanpa arah di bangku sekolah.

Padahal, Nur dikenal sebagai guru yang kreatif. Ia tidak pernah kehabisan ide dalam mengajar. Ia selalu menggunakan berbagai pendekatan, metode, bahkan media pembelajaran. Namun, semua itu tidak berhasil untuk murid disabilitasnya. Anak itu diam. Nur menyerah. Ketika anak itu menatapnya kosong, Nur berpura-pura tidak melihat. Batin Nur tersayat perih.

“Ada rasa bersalah yang begitu dalam,” katanya lirih. Cahaya pertolongan akhirnya datang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, dengan dukungan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia



Nurhayati Luther, guru SD Negeri 032 Tanjung Selor menunjukkan ponsel yang diinstal kecerdasan buatan bernama Diko. Pemkab Bulungan meluncurkan JEJOO (Jejaring Konseling Online) berbasis kecerdasan buatan Diko sebagai salah satu program inovasi terbaru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Foto: © Dokumentasi pribadi

(INOVASI)—kemitraan pendidikan antara Australia dan Indonesia—memperkenalkan sebuah program konseling daring berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence/ AI*). Nama kecerdasan buatan itu Diko. AI ini dipasang dalam aplikasi grup percakapan yang siap menjawab pertanyaan dan memberi saran terkait pembelajaran di kelas. Nur bisa bertanya kapan dan di mana saja.

Bukan hanya AI yang terlibat, program ini juga menggandeng tenaga psikolog yang turut memberikan pendampingan dan memotivasi para guru. Peran para psikolog sangat krusial. Mereka menjadi jembatan antara AI dan guru. Ketika penjelasan AI terasa seperti bahasa mesin, para psikolog inilah yang mentransformasikannya menjadi bahasa manusia yang lebih operasional dan mudah dipahami. Perpaduan antara AI dan para psikolog ini menjadikan ruang percakapan selalu hidup dan bermakna. Bagi Nur, AI dan para psikolog hadir seperti sahabat lama yang ia rindukan.

Nur mulai bercerita, bertanya, dan menyampaikan semua kebingungan yang selama ini ia pendam. Dari situ, ia mendapat banyak saran, mulai dari cara menyusun Profil Belajar Siswa (PBS), menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, hingga pendekatan sosial-emosional. Nur mengaplikasikan semua saran itu kepada murid disabilitasnya. Ia menata kembali kelasnya, mengubah pendekatan, dan perlahan memberi perhatian lebih kepada murid disabilitas itu.

Hasilnya mengejutkan. Suatu hari, setelah jam pelajaran usai, ia meminta murid itu menyelesaikan tugas di rumah. Sebelumnya, anak ini selalu enggan belajar. Namun hari itu, jawabannya berbeda.



Dua program strategis resmi diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, yaitu pemberian alat bantu belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas dan peluncuran Jejaring Konseling Online atau JEJOO. Foto: © Diskominfo Bulungan

“Tidak, Bu! Biar saya selesaikan sekarang,” kata si anak, penuh tekad.

Nur tertegun. Hatinya bergetar. Ia pun duduk di samping anak itu, menemaninya menulis meski sangat lambat. Ia menunggu dengan sabar sampai tugas selesai.

Sejak hari itu, perubahan si anak terus terlihat. Hambatan intelektual yang selama ini seperti labirin tak berujung, kini perlahan mulai terbuka. Murid yang selalu diam itu kini mulai ikut dalam kegiatan belajar berkelompok. Bahkan, ia berani tampil dalam lomba baca puisi. Kepercayaan dirinya tumbuh.

Murid itu kini sudah punya mimpi. Ia bercita-cita menjadi dokter kelak.

“Agar bisa mengobati pasien,” kata si anak sambil tersenyum gembira.

Di dalam benak Nur, seandainya program ini hadir lebih cepat, tentu lebih banyak anak disabilitas yang bisa tertolong. Dalam lamunan itu, ia mengenang kembali anak-anak disabilitas yang dulu tak mampu ia bantu.

Nur bukan satu-satunya guru yang mendapatkan manfaat dari program konseling daring ini. Program itu kini dikenal dengan nama JEJOO, singkatan dari Jejaring Konseling Online. Dalam bahasa Suku Bulungan, *jejoo* berarti “gadis

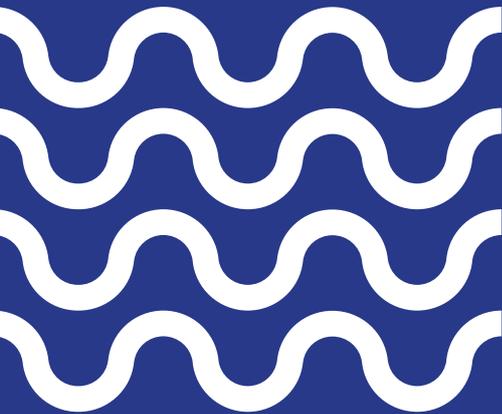
cantik.” Bupati Bulungan, Syarwani, meluncurkan JEJOO sebagai inovasi baru Bumi Tengguyun untuk membantu anak-anak disabilitas.

Bulungan menjadi pionir. Kabupaten ini menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengadopsi kecerdasan buatan secara luas untuk mendukung pendidikan inklusif. Berdasarkan data PBS Bulungan 2024, dari lebih dari 43 ribu murid, ada 568 yang menghadapi kesulitan fungsional. Tanpa pendampingan, hanya 2,8 persen dari mereka yang berpeluang menempuh pendidikan tinggi.

Dengan menganalisis data unik tiap murid, AI bisa menyarankan strategi belajar yang sesuai. Bagi murid yang sulit memahami instruksi verbal, sistem menyarankan penggunaan media visual. Bagi murid yang mudah terdistraksi, pendekatan dibuat lebih fokus. Teknologi menjadi jembatan, tetapi guru tetap menjadi kunci.

Melalui JEJOO, Pemkab Bulungan menunjukkan bahwa pendampingan terhadap guru bisa dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, menjadikannya contoh praktik baik yang layak ditiru daerah lain. Dari Tanjung Selor, kisah Nur mengingatkan kita bahwa pendidikan sejati bukan sekadar soal angka dan kurikulum. Pendidikan adalah soal hati, tentang memanusiakan semua anak, tanpa terkecuali.

*Artikel ini diterbitkan pertama kali oleh Harian Tribun Kaltara (Minggu, 11 Mei 2025).



Informasi lebih lanjut mengenai **INOVASI**:



info@inovasi.or.id



[Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia](#)



[Inovasi Pendidikan](#)



inovasi.or.id

Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) adalah program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan mendukung pembelajaran dan penguasaan keterampilan dasar bagi seluruh siswa di tingkat dasar. INOVASI hadir sejak Fase I (2016-2020), Fase II (2020-2023), dan kini memasuki Fase III (2024-2027). Wilayah kerja INOVASI mencakup tujuh provinsi di Indonesia: Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Ibukota Nusantara (IKN).

INOVASI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan mitra-mitra lokal di wilayah kerja kami. Program ini dikelola oleh Palladium atas nama pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT).